

ABSTRAK

Setelah munculnya konsep *good governance* pemerintah Indonesia berusaha menetapkan transparansi, akuntabilitas, dan adanya paartisipasi dari masyarakat dalam setiap kegiatan yang diadakan. Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam memerangi korupsi. Begitu pula bagi pemerintah daerah akuntabilitas sangatlah penting terutama dalam hal pengelolaan aset daerah. Aset daerah sangat penting bagi keberlangsungan sebuah pemerintahan di suatu daerah karena aset daerah merupakan sebuah investasi jangka panjang dari daerah tersebut. Dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku instansi pemerintah daerah yang mengelola aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah diharapkan akuntabel dalam pengelolaan aset tersebut terutama dalam menangani masalah aset tanah yang belum memiliki sertifikat. Untuk itu penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan bagaimanakah akuntabilitas para aparat pemerintah daerah khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola aset daerah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian dilakukan di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur yang merupakan satu-satunya badan yang mengelola aset daerah untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penentuan informan dipilih dengan teknik *purposive sampling* atau sampling bertujuan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan secara kualitatif, yaitu melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan validitas data diuji melalui triangulasi sumber data sehingga data yang disajikan merupakan data yang absah.

Penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan aset tanah yang belum memiliki sertifikat kurang akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari indikator akuntabilitas program yang tidak efektif dan efisien, sehingga menyebabkan pengeluaran anggaran yang semakin banyak. Begitu pula pada akuntabilitas proses masih kurang akuntabel, karena lemahnya kontrol dari negosiasi yang dilakukan pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Badan Pertanahan Nasional dan masyarakat. Disamping itu kurangnya akuntabilitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah karena kurangnya pengetahuan para aparat di lapangan mengenai letak aset tanah yang belum memiliki sertifikat.

Kata Kunci: *Good Governance*, Akuntabilitas, Aset Daerah, Sertifikasi

ABSTRACTS

After have showed a concept of good governance Indonesia government try to establish transparantion, accountability, and society's participation in every activty that had been held. Accountability is a thing that very crucial for against coruption. As well as for local government, accountablity is very important especially in local asset management. Local assets are very important for sustainability of a government because local assets are long-term investment from that region. In this matter Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah as a local government institute who manage the asset that has been had by local government, expected to be accountable in asset management especially when they handle issues of land assets that do not have certificate Cause of that this research try to describe how government accountablity especially Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah manage local assets.

This research use qualitative method with descriptive type. Research was done in Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur's office which the only institution that manage local asset for Government of East Java. Determination of informant was chosen with purposive sampling technique. Collecting data had been done with interview, observation, and documentation technique. For analysing data was used qualitative which through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion. For validating data was tested through triangulation data resources so data that was presented are valid data.

This research found that accountabilty Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah in manage land assets which have not had certificate is less accountable. It can be seen from indicator of accountability program that ineffective and inefficient, so that make lot of budget spending. As well as indicator of accountability process still less acountable, because lack of control of the negotiation which was done by Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah with Badan Pertanahan Nasional and society. In other side, lack of accountability of Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah cause lack of knowledge of the offocers in the field regarding the location of the land assets that do not have certificates.

Keywords: Good Governance, Accountability, Local Assets, Certification.